

ABSTRAK

Penelitian ini memandang praktik penghindaran pajak dapat dipicu oleh kondisi defisit kas maupun adanya kemampuan mitigasi risiko hukum yang dimiliki oleh perusahaan yang terkoneksi secara politik. Analisa dikembangkan dengan menempatkan variabel *abnormal cash out-flow* untuk mendeteksi motivasi dari aktivitas penghindaran pajak. Dengan menggunakan metode purposive sampling diperoleh 89 perusahaan terpilih dengan jumlah observasi sebanyak 445 dilakukan analisis data panel untuk pengujian hipotesis. Hasil analisis menunjukkan bahwa semakin kuat koneksi politik, maka semakin besar *abnormal cash out-flow*. Demikian juga dengan semakin besar *abnormal cash out-flow*, maka semakin kuat tindakan untuk melakukan penghindaran pajak. Disisi lain, keunggulan perusahaan yang terkoneksi secara politik dengan preferensi mitigasi risiko hukum dan kemampuan mempengaruhi proses hukum tidak cukup kuat untuk menjadi dasar dilakukannya praktik penghindaran pajak. Terakhir, *abnormal cash out-flow* tidak dapat memediasi pengaruh tidak langsung koneksi politik dengan penghindaran pajak. Penelitian ini selain berimplikasi pada pentingnya pelibatan konsep teoritis lain (seperti *resource-based view*), juga mendorong perlunya pengembangan metodologi yang lebih spesifik untuk menjelaskan pola hubungan yang terjadi antara koneksi politik dan praktik penghindaran pajak di Indonesia.

Kata kunci: Koneksi politik, *abnormal cash out-flow*, penghindaran pajak, *resource-based view*.

SEMARANG
FEB UNDIP